

Samri Tolak Efisiensi Anggaran di Samarinda, Sebut Anggaran yang Ada Masih Kurang

SAMARINDA – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk di tingkat daerah. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan kekhawatirannya atas kebijakan ini. Karena anggaran yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Kota Tepian.

Pemotongan anggaran ini berdampak pada berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang harus merelakan pemangkasan Rp4,81 triliun atau sekitar 75,2 persen dari total anggaran Rp6,39 triliun.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum terkena pengurangan anggaran sebesar Rp81,38 triliun dari total Rp110,95 triliun, atau setara 73,34 persen. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengalami pemangkasan Rp3,66 triliun dari Rp5,27 triliun, atau sekitar 69,4 persen.

Menanggapi kebijakan ini, Samri Shaputra menilai bahwa pemangkasan anggaran akan semakin memperberat kondisi keuangan daerah, terutama bagi Samarinda yang masih memiliki banyak agenda pembangunan yang belum terpenuhi. "Dengan anggaran yang ada saja kita masih kesulitan. Jika dipotong, tentu akan semakin sulit merealisasikan berbagai program pembangunan," ujarnya di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (20/2).

Samri, yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa kebijakan ini dapat berdampak langsung pada program pembangunan di Samarinda. Terlebih, APBD murni tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp4,9 triliun, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,1 triliun. "Jelas kami tidak setuju. Pemangkasan ini akan memengaruhi pembangunan yang telah direncanakan," tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, terutama dalam konteks dampaknya terhadap daerah. Menurutnya, dengan kebutuhan yang terus meningkat, pemangkasan anggaran justru bisa menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. **(adv/ai/pmr/ip)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Samri Tolak Efisiensi Anggaran di Samarinda, Sebut Anggaran yang Ada Masih Kurang, 21/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

